Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf

PENGEMBANGAN BUDAYA ISLAM PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL INDONESIA MENUJU *CULTURAL WELLBEING*

Sri Dewi Wulandari[1]
[1] STID Al Hadid Surabaya, INDONESIA
*Correspondence: sridewiwulandari@stidalhadid.ac.id

Abstract

In the era of globalization, develop an Islamic society to overcome social problems need to be accompanied by culture development to form an established system of behavior and a strong community identity. Research on the topic of culture development has not been done much, especially in the context of Indonesian society. This study seeks to develop components of culture development towards cultural well-being as part of community development in the context of Indonesian society with the peculiarities of multiculturalism. In this qualitative research, the author uses a grounded theory research strategy, thus enabling researchers to "produce" a general theory regarding culture development in a multicultural society in Indonesia. From the research, it can be concluded that, to achieve cultural welfare in the context of the development of Indonesian society, there are four components of culture development that need to be considered, namely: 1) lokal culture development; 2) development of national culture within the scope of lokal community life; 3) the development of cultural multiculturalism in the interaction between other lokal cultures; and 4) development of new cultures based on universal values that support community development. The four components are mutually influencing to form cultural wellbeing.

Article History
Received: 14-10-2021
Revised: 29-12-2021
Accepted: 31-12-2021

Keywords:
Community Development;
Cultural wellbeing;
Culturel Development;
Multiculturalism;

Abstrak

Di era globalisasi, upaya pengembangan masyarakat Islam untuk mengatasi persoalan sosial masyarakat perlu diiringi usaha pengembangan budaya untuk membentuk sistem berperilaku yang mapan dan identitas diri masyarakat yang kuat. Penelitian mengenai topik pengembangan budaya (*culture development*) masih belum banyak dilakukan, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia. Penelitian ini berupaya mengembangkan komponen pengembangan budaya menuju cultural wellbeing sebagai bagian dari pengembangan masyarakat pada konteks masyarakat Indonesia dengan kekhasan multikulturalismenya. Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan strategi penelitian grounded theory, sehingga memungkinkan peneliti untuk "memproduksi" teori umum mengenai pengembangan budaya pada masyarakat multikulturalisme di Indonesia. Dari penelitian didapatkan kesimpulan yakni, untuk mencapai kesejahteraan budaya pada konteks pengembangan masyarakat Indonesia, ada empat komponen pembangunan budaya yang perlu diperhatikan yakni antara lain: 1) pengembangan budaya lokal; 2) pengembangan budaya nasional dalam lingkup kehidupan komunitas lokal; 3) pengembangan multikulturalisme budaya dalam interaksi antar budaya-budaya lokal lainnya; dan 4) pengembangan budaya-budaya baru berbasis nilai-nilai universal yang menunjang pengembangan masyarakat. Keempat komponen tersebut bersifat saling pengaruh mempengaruhi untuk membentuk *cultural wellbeing*.

Histori Artikel
Diterima: 14-10-2021
Direvisi: 29-12-2021
Disetujui: 31-12-2021

Kata Kunci:
Cultural wellbeing;
Pengembangan Budaya;
Pengembangan Masyarakat;
Multikulturalisme;

© 2021 Sri Dewi Wulandari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Budaya merupakan suatu sistem nilai dan perilaku di masyarakat. Adanya nilai-nilai dan norma pada budaya, memudahkan masyarakat sebagai kelompok, mengatur individu anggota masyarakat agar mengarah pada tujuan berperilaku tertentu.[1] Pada masyarakat terdapat upaya pelestarian budaya dari generasi ke generasi melalui proses internalisasi budaya sejak masa kanak-kanak. Upaya pelestarian budaya dilakukan sebagai bentuk untuk mempertahankan masyarakat agar perilakunya senantiasa mengarah pada cita-cita ideal masyarakat, utamanya yang telah di cetuskan oleh para leluhur. Nilai-nilai budaya tersebut merupakan prototipe ideal dalam berperilaku dalam lingkup masyarakat tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya menjadi identitas anggota masyarakat.

Pada perkembangan teknologi informasi, kontak dan komunikasi yang terjalin antar anggota masyarakat satu dengan lainnya menjadi semakin mudah. Fenomena ini melahirkan nilai-nilai baru yang dianggap ideal sebagai pedoman dalam berperilaku, bahkan dari belahan dunia lainnya. Negara-negara barat, sebagai actor utama dalam globalisasi, juga secara aktif melakukan pemasaran budaya untuk disebarkan keseluruh dunia sebagai nilai-nilai global. Sebaliknya, pada saat yang sama, negara-negara berkembang tak mampu menyebarkan nilai-nilai lokalnya karena daya kompetitifnya yang rendah, termasuk Indonesia.[2]

Kelemahan penguasaan teknologi komunikasi dan informasi serta pasar yang luas menjadikan Indonesia sebagai target potensial bagi budaya negara-negara maju. Problematika yang muncul adalah melunturnya warisan budaya yang telah puluhan tahun ditradisikan oleh leluhur. Tradisi budaya asli tergeser oleh tradisi budaya baru yang dipromosikan negara-negara maju.[3] Pergeseran budaya ini menjadi suatu masalah karena dapat mengikis identitas masyarkat, sehingga akan muncul krisis identitas budaya.

Pada upaya pengembangan masyarakat Islam untuk mengatasi persoalan sosial masyarakat, diperlukan adanya sistem berperilaku yang mapan dan identitas diri masyarakat yang kuat. Identitas budaya menjadi modal penting dalam pengembangan masyarakat. Sehingga dalam program pengembangan masyarakat, perlu juga diiringi upaya pengembangan budaya (*culture development*).[4] Pengembangan budaya yang menjadi jati diri umat muslim di Indonesia perlu mempertimbangkan dua aspek sekaligus yakni umat Islam yang memiliki identitas keislaman sekaligus umat Islam yang memiliki identitas keindonesiaan. Tanpa mempertimbangkan kedua hal tersebut maka dapat menimbulkan polemic kultur di kalangan umat Islam Indonesia.[5]

Penelitian mengenai topik pengembangan budaya (*culture development*) masih belum banyak dilakukan, khususnya di Indonesia. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Ife (2006), mendapatkan temuan mengenai empat komponen budaya. Keempat komponen tersebut antara lain: melestarikan dan menghargai budaya lokal, melestarikan dan menghargai budaya asli/pribumi, multikulturalisme dan budaya partisipatori.[6] Gagasan Ife tersebut muncul berdasarkan proses penelitiannya pada masyarakat Australia, yang mana pada struktur sosial masyarakatnya terdapat masyarakat asli (pribumi) yang tersisih dalam pembangunan dan masyarakat pendatang yang cenderung dominan.

---

[1] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal: 156.
[2] A Safril Mubah, "Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi," *Jurnsl Unair* 24, no. 4 (2011): 302–208.
[3] Mubah.
[4] Jim Ife and Frank Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal: 449.
[5] Ali Tantowi, "The Quest Of Indonesian Muslim Identity: Debates on Veiling from the 1920s to 1940s," *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 4, no. 1 (June 1, 2010): 62, https://doi.org/10.15642/JIIS.2010.4.1.62-90.
[6] Tantowi.

Namun dalam konsep pengembangan budaya tersebut terdapat beberapa aspek yang kurang sesuai dengan struktur budaya Indonesia. Ketidaksesuaian beberapa aspek pengembangan budaya temuan Ife dengan konteks Indonesia dapat dilihat pada penelitian Musthofa (2018). Ketika hendak mendeskripsikan pengembangan budaya yang dilakukan oleh Angklung Saung Udjo, Musthofa tidak menemukan adanya perbedaan antara budaya lokal dengan budaya asli sebagai salah satu komponen pengembangan budaya pada Angklung Saung Udjo.[7] Hal ini berbeda dengan gagasan Ife yang membedakan antara budaya lokal dan budaya asli (milik pribumi) dan berupaya mengangkat budaya asli agar setara dengan budaya para pendatang.

Hal lainnya mengenai multikulturalisme sebagai salah satu komponen pengembangan budaya yang digagas Ife, perlu adanya pengembangan penjelasan mengenai pengembangan budaya pada konteks multikulturalisme Indonesia. Perlunya pengembangan konsep ini dikarenakan konteks multikulturalisme Indonesia memiliki perbedaan dengan multikultural Australia yang menjadi basis penelitian Ife. Menurut Syarifuddin (2006), multikultural pada masyarakat Australia termasuk pada model multikultural etnik dengan mengakui eksistensi dan hak-hak etnik secara kolektif, karena adanya latar belakang persoalan orang pribumi (*aborigines*) dan orang pendatang (*migrants*). Sedangkan pada multikulturalisme Indonesia keanekaragaman budaya berasal dari sesama masyarakat lokal yang memiliki perbedaan identitas suku, budaya dan agama.[8]

Pengembangan budaya dalam konteks pengembangan masyarakat arahnya adalah membentuk *cultural wellbeing*. Kajian mengenai *cultural wellbeing* ini pun masih sedikit dilakukan baik mengenai konsep dan penerapannya di masyarakat. Menurut Musthofa (2018), definisi awal tentang konsep *cultural wellbeing* ini dirumuskan oleh Kementrian Kebudayaan dan Warisan Budaya New Zealand (2002). Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Choudharey (2009) berupaya mendetilkan konsep *cultural wellbeing* menjadi indikator-indikator pengembangan budaya berdasarkan konsep mengenai 'masyarakat yang baik' pada suku Maori.[9]

Penelitian ini berupaya mengembangkan komponen pengembangan budaya yang telah digagas Ife (2006) menuju *cultural wellbeing* yang selaras dengan ajaran Islam sebagai bagian dari pengembangan masyarakat Islam pada konteks masyarakat Indonesia dengan kekhasan multikulturalismenya. Kebaruan dalam penelitian adalah pada temuan komponen-komponen baru dalam pengembangan budaya yang berasal dari pembacaan konteks multuralisme Indonesia, dimana komponen ini merupakan kembangan dari konsep pengembangan budaya yang digagas Jim Ife. Temuan-temuan ini dapat menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya dalam mendeskripsikan secara lebih komprehensif komponen-komponen pengembangan budaya di berbagai daerah di Indonesia, sebagai salah satu aspek dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan pada Angklung Saung Udjo, maka adanya temuan dari penelitian ini dapat membantu menjelaskan komponen-komponen pengembangan budaya yang dilakukan di Angklung Saung Udjo secara lebih komprehensif, karena komponen-komponen yang disampaikan oleh Jim Ife telah dikembangkan pada multikulturalisme Indonesia yang khas.

Studi ini juga menambah khasanah mengenai konsep *cultural wellbeing* yang dikembangan dari nilai-nilai ajaran Islam. Pada studi sebelumnya yang dilakukan oleh Choudharey (2009), konsep *cultural wellbeing* yang dikemukakan adalah dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada

[7] Universitas Indonesia and Budiman Mahmud Musthofa, "Pengembangan Budaya Menuju Kesejahteraan Budaya : Pelajaran Dari Pengembangan Masyarakat Di Saung Angklung Udjo, Bandung, Jawa Barat," *Sosio Informa* 4, no. 3 (December 30, 2018), https://doi.org/10.33007/inf.v4i3.1600.

[8] Achmad Fedyani Syaifuddin, "Membumikan multikulturalisme di Indonesia." *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI* 2, no. 1 (2006): 3-10.

[9] Ruth Indira Choudharey, "Cultural wellbeing and the Lokal Government Act 2002: a Hamilton case study." PhD diss., Auckland University of Technology, 2009, 45.

suku Maori. Sebagai agama yang ajarannya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, Islam memiliki nilai-nilai yang perlu ditanamkan pada jiwa-jiwa pemeluknya sehingga membentuk kepribadian yang kuat sehingga selaras dengan semangat pembangunan masyarakat. Temuan ini dapat menjadi inspirasi dan pemahaman bagi agen-agen pembangunan masyarakat yang berasal dari kalangan Islam dalam menentukan nilai-nilai budaya apa yang perlu dibangun dalam pembangunan budaya yang dilakukannya, dimana nilai-nilai ini memiliki keselarasan dengan nilai-nilai Islam dan nilai kebangsaan. Ketiadaan pemahaman mengenai multikulturalisme Indonesia, dapat mempengaruhi pada agen pembangunan masyarakat Islam atau para pemuka Islam justru menyampaikan nilai anti-multikultural seperti *selfrighteousness*, prasangka dan stereotip kelompok lain, yang dapat memupuk nilai radikalisme Islam.[10]

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis kualitatif karena berfokus pada proses dan peristiwa interaktif untuk menghasilkan penjelasan yang bersifat mendalam mengenai komponen pengembangan budaya masyarakat.[11] Penulis menggunakan strategi penelitian *grounded theory* dalam penelitian ini, sehingga memungkinkan peneliti untuk "memproduksi" teori umum mengenai pengembangan budaya pada masyarakat multikulturalisme di Indonesia.

Mulanya penulis menggambarkan multikulturalisme budaya yang ada di Indonesia, dimana kondisi multicultural ini merupakan ekosistem budaya dalam pengembangan budaya yang akan dilakukan agen pemberdaya. Pemahaman mengenai multikulturalisme Indonesia ini menjadi pijakan penulis untuk menguaikan apa saja komponen penyusun budaya-budaya yang ada di Indonesia secara deduktif. Selain itu penulis juga menelusuri berbagai penerapan pengembangan budaya yang ada di daerah-daerah Indonesia untuk diinduksi mengenai komponen-komponen yang terdapat pada pengembangan budaya tersebut. Dalam proses analisisnya, penulis melakukan relasi timbal-balik antara deduksi karakter multikulturalisme Indonesia dan Induksi dari berbagai penerapan pengembangan budaya di beberapa daerah di Indonesia. Data mengenai fakta-fakta pengembangan budaya di berbagai daerah dan teori pengembangan budaya serta konsep multikulturalisme Indonesia diolah secara dialektik sehingga menghasilkan proposisi-proposisi baru yang memungkinkan munculnya kerangka teoritis, dengan tetap menjaga kerangka tersebut secara ketat agar tidak bercampur-baur dengan data penelitian.[12]

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Multikulturalisme Masyarakat Indonesia

Indonesia merupakan masyarakat majemuk dengan keanekaragaman masyarakat dan kebudayaannya. Kemajemukan ini terbentuk dari unsur-unsur pembentuk negara-bangsa Indonesia yang beranekaragam pula baik secara geografi, fisik, populasi, sosial, ekonomi dan kebudayaan.[13]

---

[10] Zakiyuddin Baidhawy, "The problem of multiculturalism: radicalism mainstreaming through religious preaching in Surakarta." *Journal of Indonesian Islam* 4, no. 2 (2010): 268-286.

[11] W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,* Edisi 7 (Jakarta: PT Indeks, 2015), 19.

[12] John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kalitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Ketiga, Cetakan V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 98.

[13] Achmad Fedyani Syaifuddin, "Membumikan multikulturalisme di Indonesia." *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI* 2, no. 1 (2006): 3-10.

Van der Berghe menjelaskan karakteristik masyarakat majemuk yakni: (1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok yang sering kali memiliki kebudayaan atau lebih tepat sub kebudayaan, yang berbeda satu sama lainnya; (2) memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer; (3) kurang mengembangkan konsesus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar; (4) secara relatif seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya; (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; serta (6) adanya dimensi politik oleh suatu kelompok di atas kelompok-kelompok yang lain.[14]

Hubungan antar suku bangsa dan golongan yang ada di Indonesia belum seburuk seperti di beberapa negara lain, namun memiliki potensi terpendam untuk konflik. Konflik dapat muncul dari ketegangan antar suku bangsa dan golongan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada lima sumber konflik antara suku-suku bangsa atau golongan yaitu: 1) Konflik bisa terjadi kalau warga dari dua suku bangsa masing-masing bersaing dalam hal mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup yang sama; 2) Konflik juga bisa terjadi kalau warga dari satu suku bangsa mencoba memaksakan unsur-unsur dari kebudayaannya kepada warga dari suatu suku bangsa lain; 3) Konflik yang sama dasarnya, tetapi lebih fanatik dalam wujudnya, bisa terjadi kalau warga dari satu suku bangsa mencoba memaksakan konsep-konsep agamanya kepada warga dari suku bangsa lain yang berbeda agama; 4) Konflik terang akan terjadi kalau satu suku bangsa berusaha mendominasi suatu suku bangsa lain secara politis; 5) Potensi konflik terpendam ada dalam hubungan antara suku-suku bangsa yang telah bermusuhan secara adat.[15]

Integrasi dapat terwujud bila pada satu sisi ada upaya memulihkan dan membangkitkan kembali ingatan dan kesadaran kolektif masyarakat lokal dengan ciri dan identitas budayanya masing-masing, sementara di sisi lain perlu adanya komitmen untuk meningkatkan kesadaran kolektif bersama sehingga semakin kuat tumbuhnya kesadaran identitas nasional yang memang telah ada sejalan dengan perkembangan historis bangsa ini.[16] Pada masyarakat Indonesia wawasan kesatuan jiwa “Bhinneka Tunggal Ika” yang bermakna kesatuan dalam keragaman, spirit gotong royong dengan istilah berbeda-beda pada setiap daerah, seperti *sambatan/gugur gunung* (Jawa), *metetulung* (Bali), *pelagandong* (Maluku), *halawo sato* (Nias), *mapalus* (Minahasa), dan lain-lain dapat diposisikan sebagai modal budaya yang sangat penting bagi basis kehidupan berbangsa dan bernegara.[17]

Pendapat tersebut senada dengan Franz Magnis Suseno (2005:216), yakni secara tegas mengatakan bahwa Indonesia hanya dapat bersatu jika pluralitas yang menjadi kenyataan sosialnya dihormati. Ke-Indonesia-an dibangun bukan untuk menghilangkan identitas khas semua komponen bangsa, melainkan agar semuanya dapat menjadi warga Negara Indonesia tanpa merasa terasing. Sikap saling menghormati dalam identitas masing-masing, tidak memaksakan kehendak atas kelompok yang lain merupakan syarat dasar membangun masa depan bangsa Indonesia.[18]

Berbeda dengan Amerika atau Australia, isu rasial pada multikulturalisme Indonesia tidak dominan. Kalaupun ada isu rasial pribumi – Cina mengemuka beberapa tahun terakhir, lebih merupakan isu ekonomi – politik daripada isu etnik. Melalui beberapa kebijakan kewarganegaraan

[14] Ida Bagus Brata, "Kearifan budaya lokal perekat identitas bangsa." *Jurnal Bakti Saraswati (JBS)* 5, no. 1 (2016).
[15] *Ibid*., 12-13.
[16] *Ibid*., 13.
[17] *Ibid*.
[18] *Ibid*., 14-15.

seperti asimilasi pada tahun 1960-an justru menunjukkan keinginaan negara untuk mendekatkan golongan etnik Cina dengan mayoritas pribumi.[19]

Salah satu komponen budaya adalah nilai-nilai yang dianggap berharga oleh sebagian besar anggota masyarakat. Koentjaraningrat (1986) mengatakan pada masyarakat Indonesia terdapat sistem nilai yang dianggap berharga dalam kehidupan yakni antara lain nilai religius atau Ketuhanan, nilai solidaritas atau persatuan, dan nilai keadilan.[20]

Komponen Pengembangan Budaya Pada Masyarakat Multikultural Indonesia

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya penguatan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah sosialnya. Salah satu aspek pada masyarakat adalah pada budayanya. Pembangunan budaya pada dasarnya adalah pembangunan nilai-nilai dan perilaku/kebiasaan kolektif anggota masyarakat. Budaya pada masyarakat perlu direspon dan dikembangkan dengan baik oleh agen pemberdaya sehingga dapat menunjang upaya pembangunan masyarakat menuju masyarakat sejahtera.

Untuk mencapai kesejahteraan budaya pada konteks masyarakat Indonesia, ada empat komponen pembangunan budaya yang perlu diperhatikan yakni antara lain: 1) pengembangan budaya lokal; 2) pengembangan budaya nasional dalam lingkup kehidupan komunitas lokal; 3) pengembangan multikulturalisme budaya dalam interaksi antar budaya-budaya lokal lainnya; dan 4) pengembangan budaya-budaya baru berbasis nilai-nilai universal yang menunjang pengembangan masyarakat.

1. Pengembangan Budaya lokal

Masing-masing wilayah di Indonesia terdiri dari suku-suku dan agama dengan budayanya masing-masing. Budaya tersebut menjadi kearifal lokal (*lokal genius*) yang telah menjadi identitas atau kepribadian budaya bangsa. Quaritch Wales mendefinisikan konsep kearifan lokal sebagai "*....the sum of cultural characteristic which the vast majority of people have in common as a result of their experiences in early life*" (keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat/bangsa sebagai hasil pengalaman mereka di masa lampau).[21]

Kearifan lokal memiliki karakterisitik tertentu dalam merespon budaya luar dan menentukan arah perkembangan budaya. Poespowardojo (dalam Astra, 2004:114) menjelaskan lima karakteristik kearifan lokal yakni: 1) mampu bertahan terhadap budaya luar; 2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar; 3) mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur-unsur budaya luar ke dalam kebudayaan asli; 4) mampu mengendalikan; dan 5) mampu memberikan arah pada perkembangan budaya. [22]

Atas dasar penjelasan tersebut, kearifan lokal dapat dimaknai sebagai sistem nilai dan perilaku yang dimiliki komunitas lokal yang telah melembaga dalam waktu lama (sejak masa lampau), sebagai pijakan untuk mengelola perilaku komunitas ketika berhadapan dengan nilai-nilai budaya luar untuk kelangsungan hidup komunitas secara berkelanjutan.

Budaya atau kearifan lokal terdiri dari norma-norma yang memiliki levelisasi tingkat pelembagaan. Secara konseptual, ilmuan membagi tingkat pelembagaan norma menjadi empat tingkatan. Tingkat pertama atau tingkat terendah adalah cara (*usage*). Norma ini diketahui bersama namun hanya mengatur hubungan antar individu. Bagi yang melanggar norm aini

[19] Achmad Fedyani Syaifuddin, "Membumikan multikulturalisme di Indonesia." *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI* 2, no. 1 (2006): 3-10.
[20] Ida Bagus Brata, "Kearifan budaya lokal perekat identitas bangsa." *Jurnal Bakti Saraswati (JBS)* 5, no. 1 (2016).
[21] Ida Bagus Brata, "Kearifan budaya lokal perekat identitas bangsa." *Jurnal Bakti Saraswati (JBS)* 5, no. 1 (2016).
[22] *Ibid*.

hanya akan diingatkan ditingkat individu. Misalnya: berdecak waktu makan, dikecam oleh orang disampingnya, sebab tidak pantas. Tingkat kedua adalah kebiasaan (*folkways*) yakni pola perbuatan yang terjadi karena terus diulang-ulang, dan diterima secara umum. Bagi pelanggar norma ini akan dikecam oleh banyak orang. Misalnya, cara memberi hormat kepada orang yang lebih tua. Tingkat ketiga adalah tata kelakuan (*mores*) yakni kebiasaan yang telah berubah menjadi tata perilaku yaitu memberi keharusan dan memberi larangan. *Mores* juga merupakan alat pengawasan perilaku anggota masyarakat. Mores berguna untuk memberi batas kelakuan yang dibolehkan dan yang tidak, mengintegrasikan individu kedalam kelompoknya dan memaksa kelompok untuk mengakui keteladanan individu yang berjasa sebagi pahlawannya, menjaga keutuhan, kerjasama dan solidaritas antara sesama anggotanya. Bagi yang melanggar mores akan dihukum oleh seluruh anggota masyarakat. Jika *mores* itu telah diabadikan, ditaati sepenuhnya, dan tak dibiarkan orang melanggarnya tanpa sangsi yang setimpal. Ia merupakan warisan turun temurun yang biasanya dikenal dengan istilah adat istiadat (*custom*). Norma pada tingkat adat istiadat merupakan pelembagaan norma tertinggi, dimana bagi pelanggarnya maka akan mendapatkan pengusiran atau tidak diakuainya sebagai bagian dari masyarakat.

Seiring dengan perkembangan jaman dan perubahan yang terjadi baik pada kondisi alam maupun manusianya, norma-norma di masyarakat ada yang masih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan atau masalah masyarakat, dan ada norma yang sudah tidak sesuai yang bila dibiarkan justru dapat menghambat upaya pembangunan masyarakat. Misalnya saja norma-norma pada budaya patriarki yang cenderung mengekang perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.[23] Contoh lainnya pada budaya kesehatan di berbagai daerah di Indonesia, ada jenis pengobatan dan penyembuhan berakar dari kepercayaan gaib, magis dan religiusitas, yang berasal dari kepercayaan terhadap sosok supernatural tentang penyebab penyakit. Pengobatan dan penyembahan ditekankan pada keharmonisan hubungan atau pengusiran agen penyakit itu. Model ini dianut para penyembuhnya dengan berbagai sebutan yaitu *dukun*, orang pintar, kiai, para normal, *prana*, dll.[24]

Dalam mengembangkan budaya lokal, agen pembangunan masyarakat perlu mengidentifikasi apa saja nilai-nilai budaya lokal pada komunitas yang mau dibangungan, utamanya nilai-nilai budaya dengan tingkat pelembagaan yang kuat seperti tata kelakuan (*mores*) atau adat istiadat (*custom*). Nilai-nilai budaya lokal ini kemudian dievaluasi linieritasnya dengan upaya pembangunan masyarakat menjadi sejahtera.

Pemahaman mengenai kesesuaian nilai dan perwujudan nilai dengan tujuan pembangungan masyarakat menjadi pijakan bagi agen pembangunan masyarakat dalam merespon budaya lokal. Secara umum ada tiga pilihan respon yang dapat dilakukan yakni mendukung dan melestarikan nilai dan perwujudan nilai budaya lokal, menolak nilai dan atau perwujudan nilai budaya lokal dan memodifikasi nilai dan atau perwujudan nilai budaya lokal.

Pilihan respon pertama yakni mendukung dan melestarikan budaya lokal, dilakukan pada budaya lokal yang linier dengan tujuan pembangunan masyarakat. Dalam kaitan ini kearifan lokal sebagai pusaka budaya menempati posisi sentral sebagai inspirasi dalam penguatan jati diri atau identitas kultural. Penguatan jati diri suatu kelompok etnik atau bangsa menjadi begitu penting di era globalisasi, dengan harapan jangan sampai tercerabut dari akar budaya yang kita warisi dari para pendahulu di tengah-tengah kecenderungan homogenitas kebudayaan sebagai

[23] Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A, "Menyoroti budaya patriarki di Indonesia." *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 71-80.
[24] Rusmin Tumanggor, "Masalah-masalah sosial budaya dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia." *Jurnal masyarakat dan Budaya* 12, no. 2 (2010): 231-254.

akibat dari globalisasi.[25] Menggunakan nilai-nilai budaya lokal untuk menjawab berbagai tantangan inilah sebagai wujud nyata revitalisasi budaya lokal itu. Bahkan tidak hanya mampu menjawab berbagai tantangan ke depan, namun kearifan lokal itu dapat dijadikan sebagai perekat sekaligus memperkokoh identitas bangsa.[26]

Dalam memodifikasi nilai dan perwujudan nilai budaya lokal dapat menggunakan beberapa pilihan model yang dirumuskan oleh Paul S.N. (Lee 1991 dalam Goonasekera et al. 1996: 98-99). Paul menemukan adanya empat cara budaya lokal dalam merespons budaya asing yang dibawa globalisasi. Pertama, *parrot pattern*; merupakan pola penyerapan secara menyeluruh budaya asing dalam bentuk dan isinya, seperti halnya burung kakatua (*parrot*) yang meniru secara total suara manusia tanpa memedulikan arti atau maknanya. Kedua, *amoeba pattern*; merupakan pola penyerapan budaya asing dengan mempertahankan isinya tapi mengubah bentuknya, sama halnya dengan amoeba yang muncul dalam bentuk berbedabeda tapi substansinya tetap sama. Contohnya, program televisi dari asing yang dibawakan pembawa acara lokal sehingga tak mengesankan program impor. Ketiga, *coral pattern*; merupakan pola penyerapan budaya asing dengan mempertahankan bentuknya tapi mengubah isinya, sesuai dengan karakter batu karang (*coral*). Contohnya, lagu yang dimainkan dengan melodi dari asing tapi liriknya menggunakan bahasa lokal. Keempat, *butterfly pattern*; merupakan pola penyerapan budaya asing secara total sehingga menjadi tak terlihat perbedaan budaya asing dengan budaya lokal. Seperti halnya metamorfosis kupukupu (*butterly*) yang membutuhkan waktu lama, pola ini juga membutuhkan waktu lama.[27]

Dalam melakukan modifikasi budaya, agen perlu terlebih dulu memahami aspek manakah yang perlu dipertahankan dan diubah dari budaya lokal. Bila nilai-nilainya tidak linier dengan pembangunan masyarakat sedangkan perwujudan nilainya masih linier maka cara modifikasi yang ditempuh hanya perfokus pada perubahan nilai dengan tetap mempertahankan perwujudan nilainya. Bila ketidak sesuaiannya hanya pada aspek perwujudan nilainya saja sedangkan secara nilai masih linier maka cara yang ditempuh hanya perfokus pada perubahan wujud budayanya. Misalnya dengan mencontohkan perilaku atau peralatan yang lebih sesuai dengan konteks masalah masyarakat saat ini. Namun bila ketidak sesuaian baik pada nilai dan perwujudannya maka agen perubahan dapat melakukan penolakan pada budaya tersebut atau menawarkan budaya baru sebagai tandingan. Upaya penolakan pada nilai maupun perwujudan budaya dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat pelembagaan budaya, misalnya dengan menurunkan sanksi bila melanggar budaya tersebut, mengurangi intensitas hingga menghilangkan sosialisasi budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan sehingga lambat laun dapat menurunkan jumlah anggota masyarakat yang menjalankan budaya tersebut.

Program pembangunan masyarakat yang dilakukan perlu diintegrasikan dengan hasil pembacaan atas budaya lokal. Karena adanya program-program pembangunan masyarakat secara tidak langsung memberikan pengondisian baru pada masyarakat sehingga dapat berpengaruh pada budaya masyarakat. Bila tidak diintegrasikan maka program yang ada berkemungkinan menggerus budaya-budaya lokal yang dapat mendukung pembangunan. Sebagaimana pembangunan masyarakat di desa nglanggeran melalui program desa wisata

[25] Ida Bagus Brata, "Kearifan budaya lokal perekat identitas bangsa." *Jurnal Bakti Saraswati (JBS)* 5, no. 1 (2016).
[26] *Ibid*.
[27] A. Safril Mubah, "Strategi meningkatkan daya tahan budaya lokal dalam menghadapi arus globalisasi." *Jurnal Unair* 24, no. 4 (2011): 302-308.

menimbulkan dampak-dampak pada budaya masyarakat, selain dampak sosialnya khususnya aspek ekonomi masyarakat. [28]

Pada pembangunan masyarakat Nglanggeran tersebut diketahui terdapat perubahan yang bersifat positif pada budaya masyarakatnya yakni masyarakat menjadi lebih terbuka dan toleran terhadap kebudayaan yang berbeda, meningkatnya ritme kehidupan masyarakat desa yang sebelumnya cenderung lambat dan mengaktifkan kesenian lokal yang sempat vakum dan hampir punah. Namun pembangunan tersebut juga berdampak negative terhadap budaya lokal misalnya semakin longgarnya hubungan antar anggota masyarakat yang awalnya erat karena kurangnya waktu bersosialisasi dan adanya kerusakan aset-aset budaya akibat aksi vandalisme. Pada perubahan atas semakin terbuka dan tolerannya masyarakat desa pada budaya yang berbeda tersebut juga perlu diwaspadai agar jalannya pembangunan tidak sampai mencerabut identitas asli masyarakat desa.

Dalam konteks pembangunan masyarakat Islam, dialog antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam dapat dilihat pada masyarakat Islam di Bali. Keberadaan budaya lokal di Bali sangat mempengaruhi identitas keislaman khas Bali yang lebih progresif, toleran dan egaliter. Islam di Bali tidak melihat budaya lokal sebagai ancaman tetapi sebagai pemicu respon kreatif yang intens agar Islam dapat menjawab permasalahan universal. Dengan proses seperti itu, baik Islam maupun Hindu sebagai pemangku budaya lokal tidak kehilangan nilai masing-masing, tetapi justru, kedua agama saling melengkapi sebagai bagian dari budaya lokal (Bali). Kontekstualisasi Islam universal dengan realitas sosial (budaya, agama) di wilayah setempat sehingga fitrah Islam menghasilkan nilai-nilai inklusif (terbuka), *tasamuh* (toleran) dan bukan merupakan pemaksaan terhadap kehendak agama setempat.[29]

Gambaran lainnya dapat dilihat pada komunitas muslim moderat di Lombok. Muslim moderat di Lombok telah berhasil menerapkan ajaran Islam dengan yang didialektikakan dengan budaya lokal seperti yang ditonjolkan dalam pertemuan harmonis sehari-hari masyarakat di pulau itu. Norma Islam yang dikembangkan mampu berkomunikasi dengan kearifan lokal melalui proses seleksi, adaptasi dan akulturasi.[30]

Budaya sebagai institusi dalam berperilaku yang telah ada sejak masa lampau, tidak dapat dikelola secara perseorangan oleh agen pembangunan. Dalam upaya pengembangan budaya lokal, agen pemberdaya perlu bekerjasama dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan pastisipasi masyarakat lokal. Tanpa partisipasi masyarakat dan dukungan instansi yang berwenang, upaya pelestarian budaya lokal maupun perubahan budaya lokal akan sulit dilakukan. Hal ini sesuai dengan apa yang dialami oleh Desa Budaya di Desa Banjarharjo Yogjakarta. Upaya pelestarian budaya lokal yang dilakukan di desa tersebut mengalami tantangan karena rendahnya keterlibatan generasi muda dalam menyelenggarakan seni budaya, lemahnya fungsi lembaga desa budaya di tingkat desa dan lemahnya forum komunikasi warga desa untuk mendukung pengembangan desa budaya.[31]

[28] Hary Hermawan, "Dampak Pengembangan Desa Wisatanglanggeran Terhadap Sosial Budaya Masyarakat Lokal." (2017).
[29]Kunawi Basyir, "THE "ACCULTURATIVE ISLAM" AS A TYPE OF HOME-GROWN ISLAMIC TRADITION." *Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 2 (2018): 309-334.
[30] Mutawali Mutawali, "Moderate Islam in Lombok: The dialectic between Islam and local culture." *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 2 (2016): 309-334.
[31] Reny Triwardhani dan Christina Rochayanti, "Implementasi Kebijakan Desa Budaya dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal." *Reformasi* 4, no. 2 (2014).

2. Pengembangan Budaya Nasional Dalam Lingkup Kehidupan Komunitas Lokal

Pada Masyarakat Indonesia, selain terdapat budaya lokal juga terdapat budaya nasional. Menurut Koentjaraningrat dalam buku Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan (2004), kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara, memiliki syarat mutlak yang khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap negara dan warga negara.[32] Oleh karena itu kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Istilah "rakyat Indonesia seluruhnya" sesungguhnya di dalamnya terimplisit suatu pernyataan bahwa kebudayaan salah satu suku bangsa belum dapat dikatakan kebudayaan nasional.[33]

Pembangunan budaya nasional pada komunitas lokal perlu dilakukan untuk membentuk integrasi antar daerah dan suku dengan budayanya masing-masing. Budaya nasional inilah yang mengikat perbedaan budaya tersebut sebagai suatu kesatuan bangsa yang memiliki kesamaan identitas nasional.

Koentjaraningrat (1986) mengatakan pada masyarakat Indonesia terdapat sistem nilai yang dianggap berharga dalam kehidupan yakni antara lain nilai religius atau Ketuhanan, nilai solidaritas atau persatuan, dan nilai keadilan.[34] Dalam pengembangan budaya sebagai bagian dari pengembangan masyarakat pada masyarakat Indonesia, perlu membangun ketiga nilai budaya tersebut dalam wujud yang memungkinkan berbeda-beda disesuaikan dengan konteks budaya lokalnya. Ketiga nilai budaya tersebut merupakan identitas bangsa yang perlu dilestarikan dan diwujudkan dalam komunitas-komunitas lokal.

Dalam pengembangan budaya nasional ini agen pembangunan masyarakat perlu terlebih dulu mengenali budaya lokal pada komunitas tersebut. Secara umum, masing-masing komunitas telah memiliki ketiga nilai-nilai budaya tersebut dalam komunitasnya, karena adanya ketiga nilai budaya tersebut menjadi budaya nasional karena budaya tersebut telah diterima masyarakat secara nasional. Namun di tengah era globalisasi, nilai-nilai tersebut memungkinkan mengalami pengikisan.

Mulai mengikisnya budaya persatuan atau solidaritas dapat kita temui pada konflik sosial di Lampung. Kontestasi berbagai kepentingan ekonomi politik dengan perbedaan kebudayaan dalam pola pikir, pandangan hidup dan praktik budaya yang dipresentasikan kelompok-kelompok etnik di Lampung telah menjadi penyebab pecahnya konflik. Interaksi sempit karena ketiadaan ruang-ruang bersama dalam perjumpaan lintas budaya telah menyebabkan kegagalan akulturasi yang memungkinkan tidak pernah terciptanya pemahaman dan upaya kolaborasi berbagai budaya dapat dilakukan.[35] Penguatan nilai-nilai budaya persatuan atau solidaritas sosial juga penting dilakukan pasca konflik di Ambon da Poso. Penguatan nilai-nilai persatuan ini dapat membentuk kerukunan dan keharmonisan antar agama.[36]

Selain itu, adanya globalisasi juga membawa masuknya nilai-nilai barat yang cenderung sekuler. Sekulerisme menawarkan adanya pemisahan antara kehidupan sosial dengan agama.

---

[32] Cahya Dicky Pratama, "Kebudayaan Nasional: Definisi dan Bentuknya", diakses pada 15 Maret 2021 https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/15/175356169/kebudayaan-nasional-definisi-dan-bentuknya?page=all#:~:text=Menurut%20Koentjaraningrat%20dalam%20buku%20Kebudayaan,terhadap%20negara%20dan%20warga%20negara.

[33] Ida Bagus Brata, "Kearifan budaya lokal perekat identitas bangsa." *Jurnal Bakti Saraswati (JBS)* 5, no. 1 (2016).

[34] *Ibid*.

[35] M. Alie Humaedi, "Kegagalan akulturasi budaya dan isu agama dalam konflik lampung." *Analisa: journal of social science and religion* 21, no. 2 (2014): 149-162.

[36] Masyrullahushomad, "Mengokohkan Persatuan Bangsa Pasca Konflik Bernuansa Agama di Ambon dan Poso." *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 15, no. 1 (2019).

Agama hanya ditempatkan pada ranah privat, sedangkan pada bidang-bidang yang menyangkut kehidupan orang banyak maka tidak memasukkan agama. Nilai ini tentu tidak sesuai dengan nilai religiusitas atau Ketuhanan sebagai budaya nasional Indonesia. Meski Indonesia bukan negara agama, namun masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ber-Ketuhanan. Sehingga praktek-praktek budaya seperti kebebasan berperilaku (liberalisme) tidak sesuai dengan masyarakat berketuhanan, yang mempertimbangkan Tuhan dalam perilaku.

3. Pengembangan Multikulturalisme Budaya Dalam Interaksi Antar Budaya Lokal Lainnya

Mengacu pendapat Ida Bagus Brata (2016), integrasi sosial pada masyarakat Indonesia dapat terwujud bila ada pada penguatan pada dua sisi sekaligus, yakni penguatan budaya lokal pada masing-masing komunitas lokal dan sekaligus penguatan identitas nasional untuk meningkatkan kesadaran bersama. Hasil dari kedua penguatan ini membentuk adanya multikulturalisme di Indonesia. Sehingga multikulturalisme Indonesia merupakan kondisi lanjutan atas penguatan budaya lokal dan budaya nasional.

Multikulturalisme merupakan kondisi dimana masing-masing budaya yang berbeda diakui dan dapat hidup berdampingan pada satu lingkup kehidupan bersama. [37] Pada konteks Indonesia, multikulturalisme sejalan dengan salah satu nilai budaya nasional yakni kesatuan atau solidaritas sosial. Sehingga dalam masyarakat multikulturalisme Indonesia mengandung dua identitias sekaligus, yakni identitas masing-masing budaya lokal dan identitas bersama semua budaya lokal yakni berupa identitas nasional. Tidak hanya di Indonesia, hampir semua negara di dunia tersusun dari anekaragam kebudayaan – artinya perbedaan menjadi asasnya.

Pengembangan budaya pada multikulturalisme Indonesia dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara dengan mengutamakan kesetaraan dan saling menghargai.[38] Misalnya dalam bidang pendidikan, di sekolah siswa mendapatkan pelajaran Bahasa daerahnya masing-masing dan Bahasa Indonesia sekaligus. Dengan demikian generasi penerus tetap mendapatkan sosialisasi budaya daerahnya tanpa menghilangkan pula Bahasa Indonesia sebagai wujud komunikasi persatuan dalam institusi pendidikan.

Sebagai prototipe multikulturalisme di Indonesia adalah DKI Jakarta. Meski menjadi ikon Ibukota Negara RI, namun Jakarta sebagai wilayah Urban ternyata kondisi penduduknya masih relatif rural dalam ikatan yang kaya tradisi lokal (sebagaimana masih dominan dalam ikatan budaya atau enkulturasi yang ada pada tradisi masyarakat pedesaan) yang kini menjadi "perkampungan besar" (*the big village*) didiami oleh penduduk yang beragam etnis, tradisi budaya, bahasa dan seni, bahkan hingga keragaman dalam beragama dan kepercayaan yang dianut warganya. Meskipun Jakarta dikenal perkotaan megapolis sebagai pusat Ibukota Negara, namun penghuninya yang multikultur membuat Jakarta semakin menggambarkan pesona keindonesiaan.[39]

Multikulturalisme dapat terbentuk ketika masing-masing budaya lokal menguat identitas lokalitasnya. Tidak hanya pada satu etnis maupun suku saja, namun pada tiap-tiapnya. Misalnya pada masyarakat DKI Jakarta yang multi etnis, pengembangan budaya dapat dilakukan dengan menguatkan identitas masing-masing etnis seperti Betawi, Jawa, China, Sunda, Batak, dll disatu

[37] Achmad Fedyani Syaifuddin, "Membumikan multikulturalisme di Indonesia." *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI* 2, no. 1 (2006): 3-10.
[38] *Ibid*.
[39] Rahmatulloh, "DINAMIKA KEPENDUDUKAN DI IBUKOTA JAKARTA (Deskripsi Perkembangan Kuantitas, Kualitas dan Kesejahteraan Penduduk di DKI Jakarta)." *Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 8, no. 2 (2018).

sisi, dan pembangunan budaya nasional pada seluruh etnis tersebut. perwujudan budaya nasional di DKI Jakarta disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat DKI Jakarta. Misalnya membangun solidaritas sosial antar etnis dalam satu kegiatan pameran kesenian yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat DKI dengan melibatkan semua etnis. dengan Oleh karena itu pembangunan budaya pada pembangunan masyarakat perlu dilakukan secara merata, utamanya pada komunitas-komunitas yang mulai kehilangan identitas lokalnya.

Dalam pembangunan masyarakat Islam, interaksi antar budaya lokal dapat dilihat pada pembangunan Masjid Cheng Ho. Masjid Cheng Ho merupakan hasil interaksi antar budaya etnis China dan budaya lokal, dimana masjid tersebut memiliki keunikan yang khas sebagai wujud multikultur Tionghoa di Indonesia.[40]

4. Pengembangan Budaya Baru Berbasis Nilai-Nilai Universal

Pada perkembangan teori etika normatif, terdapat pandangan mengenai relativisme kultural. Pandangan relativisme ini mengatakan bahwa norma-norma moral yang berlaku pada berbagai masyarakat dan kebudayaan tidak sama, melainkan berbeda satu sama lain. Pandangan ini juga sering disebut sebagai relativisme deskriptif, karena standart berperilaku yang diterapkan hanya sekedar menunjuk pada fakta pluralism norma-norma moral yang dapat diamati pada berbagai masyarakat di dunia.[41] Konsekuensi dari padangan ini adalah tidak adanya norma yang berlaku secara universal untuk diterapkan disetiap masyarakat. Selain itu dari padangan tersebut menunjukkan perbedaan norma di tiap-tiap masyarakat kedudukannya sama baiknya, sehingga tidak membenarkan yang satu dan menyalahkan lainnya.

Pandangan relativisme kultural kemudian mendapatkan kritik dari para etikawan. Menurut Frans Magnis, memungkinkan bahwa dari keanekaragaman pendapat moral itu hanya satu saja yang benar dan pendapat-pendapat lainnya keliru. Ada kemungkinan bahwa banyak masyarakat mempunyai pandangan-pandangan moral yang kurang memadai.[42] Sehingga norma norma yang berlaku di masyarakat dapat dinilai benar dan salahnya dengan melihat aspek-aspek rasionalnya.

Pada suku-suku Eskimo terdapat peraturan dimana anak-anak dewasa harus menewaskan orang tua mereka yang sudah mulai tua dan lemah misalnya dengan mendudukkan mereka di luar gubug dalam salju yang amat dingin. Aturan ini menurut Frans Magnis dapat diterangkan secara rasional berdasarkan keadaan daerah dimana suku tersebut berada. Karena iklim selalu amat dingin, maka menunggu kematian karena sakit tua itu penuh penderitaan yang dapat berlangsung bertahun-tahun, sedangkan dengan menewaskan dalam waktu cepat lebih mudah dan menggembirakan.

Atas dasar pendapat tersebut penulis menilai perlu adanya penilaian yang bersifat rasional pada norma budaya lokal maupun nasional. Adanya keanekaragaman budaya lokal di Indonesia tidak sama dengan menerimanya secara mentah tanpa upaya rasional untuk menilai norma-norma tersebut apakah benar atau salah. Sehingga dalam pengembangan budaya, seorang agen pembangunan perlu memiliki pandangan mengenai universalime nilai moral dalam norma-norma yang ada di masyarakat.

Nilai-nilai universal adalah nilai yang berlaku sama bagi seluruh manusia. Dikatakan universal karena nilai ini dapat dipertanggung jawabkan benar dan salahnya secara rasional. Universalitas nilai menjadi pijakan dalam mengatur moral semua manusia dan menjadi pijakan

[40]Choirul Mahfud, "The Role of Cheng Ho Mosque: The New Silk Road, Indonesia-China Relations in Islamic Cultural Identity." Journal of Indonesian Islam 8, no. 1 (2014): 23-38.
[41] Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsasfat Moral (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), 109.
[42] Ibid.

dalam menyusun tata perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun masing-masing komunitas tinggal dalam lingkup kebudayaan yang berbeda dengan historisitas yang berbeda, namun setiap manusia di dalamnya terikat hukum-hukum natural yang sama, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Apa yang baik bagi satu manusia maka dapat menjadi kebaikan pada manusia lainnya. Misalnya membunuh, merupakan keburukan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hak dasar manusia untuk hidup. Kebolehan atas perilaku membunuh pun harus didasari sebab-sebab rasional, yang bila tidak ada sebab-sebab tersebut maka membunuh tetap bernilai salah.

Kedudukan nilai universal ini menjadi standart dalam mengevaluasi budaya lokal maupun nasional. Norma-norma budaya yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya maka harus ditolak, karena baik jangka panjang maupun jangka pendek akan mendatangkan persoalan karena bertentangan dengan hukum natural manusia dan masyarakat. misalnya budaya di bidang kesehatan yang ada di masyarakat lokal, apabila cara pengobatan tradisional tersebut bertentangan dengan hukum-hukum kesehatan dan kesembuhan dan justru dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih buruk maka harus ditolak.

Nilai-nilai universal ini juga sejalan dengan nilai-nilai pada agama. Agama mengajarkan bahwa nilai pada perilaku manusia bersifat mutlak, tidak relative. Hal ini pun juga berlaku pada perilaku yang secara kolektif dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu ajaran agama sangat baik dalam hal pembinaan masyarakat untuk menuju pada kesejahteraan dan sekaligus nurani masyarakat itu sendiri.[43]

Menjadikan agama sebagai pijakan dalam menentukan baik dan buruk nilai perilaku, relevan dengan semangat Islam. Kuntowijoyo mengatakan bahwa Islam bukanlah sistem teokrasi maupun ajaran teologi semata. Hal tersebut berbeda dengan pengertian agama sebagaimana dipahami oleh Barat. Di dalam struktur keagamaan Islam tidak dikenal pembedaan antara ranah duniawi dan *ikhrawi* (agama). Lebih lanjut ia menegaskan bahwa, konsep tentang agama di dalam Islam pada dasarnya bersifat *all-embracing* bagi penataan sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya.[44] Bagi Kuntowijoyo, tugas terbesar umat Islam sesungguhnya adalah melakukan transformasi sosial dan budaya dengan nilai-nilai itu.[45]

Visi Islam tentang budaya adalah *nur*, yakni tentang pencerahan dalam keberimanan. Kebudayaan menjadi budaya Islam apabila unsur kebudayaan tersebut secara vertical ujungnya adalah *tahwid*. Sedangkan secara horizontal ujungnya pada amal atau aksi. Dengan demikian, Islam menjadikan *tahwid* sebagai pusat dan semua orientasi nilai, sementara pada saat yang sama melihat manusia sebagai tujuan dan transformasi nilai. Menurut Kuntowijoyo, dalam konteks inilah Islam itu disebut sebagai *rahmatan li al-alamin*. [46]

Integrasi Antar Komponen Dalam Membentuk *Cultural Wellbeing*

Dewasa ini kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang.[47] Kebudayaan meliputi segala perbuatan manusia. Kebudayaan adalah sesuatu yang bersifat dinamis, tidak statis.[48] Sifat dinamis budaya salah satunya dipengaruhi oleh sifat

[43] Rizal Mubit, "Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2016): 163-184.
[44] M. Amin Nurdin, Eva Nugraha dan Dadi Darmadi, *Sosiologi Al-Qur'an Agama dan Masyarakat dalam Islam* (Jakarta: LPPM UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 60-61.
[45] *Ibid*., 61.
[46] *Ibid*., 61-62.
[47] C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan, cetakan kelima (Yogyakarta: Kanisius, 1994).10
[48] Ibid., 11.

manusia sendiri sebagai penghasil budaya. Manusia sebagai pencipta sekaligus konsumen budaya, senantiasa melakukan penilaian atas budaya disekitarnya. Misalnya bagaimana hasilnya? Bagaimana perkembangan seterusnya? Benarkah arah yang sedang kita tempuh sekarang ini atau sebaliknya? Manakah budaya yang dapat dibenarkan? Manakah yang perlu ditolak?[49]

Menurut Kant: ciri khas kebuyadaan terdapat dalam kemampuan manusia untuk mengajar dirinya sendiri. Kebudayaan manusia tidak hanya bertanya bagaimana sifat-sifat sesuatu, melainkan pula bagaimana sesuatu seharusnya bersifat.[50] Dewasa ini manusia sadar akan kebudyaaannya. Kesadaran ini merupakan suatu kepekaan yang mendorong manusia agar dia secara kritis menilai kebudayaan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu perkembangan kebudayaan harus selalu dievaluasi sehingga gerak perubahan budaya mengarah pada perbaikan dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia.

Peran agama dalam masyarakat bukan hanya sebagai perekat sosial sebagai mana yang dikemukakan Emile Durkheim.[51] Lebih dari itu agama dengan ajaran-ajaran yang bersifat universal di dalamnya dapat memandu manusia dalam mengevaluasi kebudayaannya. Ajaran dan perintah kebaikan dalam agama menjadi kontrol bagi individu dan masyarakat.

Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, yakni sebagai pengganti dan wakil Allah di bumi untuk menjalankan amant-amanat-Nya.[52] Adanya akal dan pikiran yang dimiliki manusia menjadi pembeda, yang menjadikan manusia sebagai makhluk mulia dari makhluk lainnya.[53] Akal dapat diartikan sebagai suatu potensi rohaniah untuk membedakan benar dan salah. Dengan menggunakan akal, kebudayaan dapat dikaji untuk menemukan nilai-nilai yang benar untuk diterapkan di masyarakat.

Sehingga bila diintegrasikan antara keempat komponen tersebut, maka nilai-nilai universal menjadi pijakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi atas budaya lokal dan nasional. Nilai-nilai universal ini alamiahnya akan selaras dengan nilai-nilai agama, karena ketika manusia menggunakan akalnya maka ia akan menemukan kebenaran, dan kebenaran yang dicapai oleh manusia sama dengan kebenaran yang disampaikan Tuhan. Hasil penilaian manusia atas norma ini dapat dibuktikan melalui pertanggung jawaban yang bersifat rasional berdasarkan kesesuaian noma tersebut dengan sifat-sifat dasar manusia dan konteks lingkungan hidupnya.

Budaya lokal yang relevan dengan tujuan pembangunan dan nilai universal ini kemudian dikembangkan. Sebaliknya budaya yang tidak sesuai maka dapat ditolak. Sedangkan apabila pada komunitas tersebut secara rasional membutuhkan adanya nilai-nilai baru untuk menunjang pembangunannya, maka agen pembangunan dapat melakukan sosialisasi nilai baru hingga melembagakannya dengan bekerjasama dengan pihak-pihak berwenang dan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat agar budaya tersebut dapat cepat diterima. Pada budaya lokal yang masih relevan sebagian dan kurang relevan di bagian lainnya (baik pada aspek nilai atau perwujudan nilainya), dapat dilakukan modifikasi budaya. Modifikasi budaya lokal dapat kita lihat pada komunitas Muslim di Lingsar Bali. Keikutsertaan komunitas muslim pada tradisi topat yang

[49] Ibid., 16.
[50] Ibid., 14.
[51] Rizal Mubit, "Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2016): 163-184.
[52] M. Amin Nurdin, Eva Nugraha dan Dadi Darmadi, *Sosiologi Al-Qur'an Agama dan Masyarakat dalam Islam* (Jakarta: LPPM UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 75.
[53] *Ibid*.

merupakan tradisi lokal masyarakat Bali dilakukan dengan mengkonstruksi ulang makna situs perang topat, peralatan, dan ritualnya.[54]

Ketika pengembangan budaya lokal sukses dilakukan, pengembangan budaya nasional yang disesuaikan dengan komunitas lokal sukses dilakukan maka akan tercipta multikulturalisme budaya. Multikulturalisme budaya tersebut dapat menjadi kesejahteraan budaya manakala nilai-nilai universal dijadikan landasan dalam usaha koreksi atas budaya lokal dan nasional. Sehingga kesejahteraan budaya dapat tercapai bila pembangunan norma-norma sosial yang dilandasi nilai-nilai universal dengan tetap menyesuaikan kondisi masing-masing komunitas.

D. SIMPULAN

Untuk mencapai kesejahteraan budaya pada konteks pengembangan masyarakat Indonesia, ada empat komponen pembangunan budaya yang perlu diperhatikan yakni antara lain: 1) pengembangan budaya lokal; 2) pengembangan budaya nasional dalam lingkup kehidupan komunitas lokal; 3) pengembangan multikulturalisme budaya dalam interaksi antar budaya-budaya lokal lainnya; dan 4) pengembangan budaya-budaya baru berbasis nilai-nilai universal yang menunjang pengembangan masyarakat. Keempat komponen tersebut bersifat saling pengaruh mempengaruhi untuk membentuk *cultural wellbeing*. Pengembangan budaya lokal dan budaya nasional tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal yang ada pada ajaran Islam. Pada komunitas yang budaya lokalnya tidak mendukung pada tujuan pembangunan maka perlu dilakukan pembangunan budaya-budaya baru berbasis nilai universal yang wujudnya disesuaikan pada masyarakat tersebut. Kesuksesan pembangunan budaya lokal pada satu sisi dan budaya nasional di sisi lain dapat membentuk multikultiralisme Indonesia yang dapat membawa masyarakat pada kemajuan budaya berbasis nilai-nilai universal yang selaras dengan ajaran Islam.

Daftar Pustaka

Baidhawy, Zakiyuddin. "The problem of multiculturalism: radicalism mainstreaming through religious preaching in Surakarta." *Journal of Indonesian Islam* 4, no. 2 (2010): 268-286.

Basyir, Kunawi. "THE "ACCULTURATIVE ISLAM" AS A TYPE OF HOME-GROWN ISLAMIC TRADITION." *Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 2 (2018): 309-334.

Brata, Ida Bagus. "Kearifan budaya lokal perekat identitas bangsa." *Jurnal Bakti Saraswati (JBS)* 5, no. 1 (2016).

Choudharey, Ruth Indira. "Cultural wellbeing and the Lokal Government Act 2002: a Hamilton case study." PhD diss., Auckland University of Technology, 2009.

Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kalitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Ketiga, Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Hermawan, Hary. "Dampak Pengembangan Desa Wisatanglanggeran Terhadap Sosial Budaya Masyarakat Lokal." (2017).

Humaedi, M. Alie. "Kegagalan akulturasi budaya dan isu agama dalam konflik lampung." *Analisa: journal of social science and religion* 21, no. 2 (2014): 149-162.

Ife, Jim, and Frank Tesoriero. "Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2008).

[54] Suprapto Suprapto, "Sasak Muslims And Interreligious Harmony: Ethnographic Study of the Perang Topat Festival in Lombok-Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017): 77-98.

Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsasfat Moral.* Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987.

Mahfud, Choirul. "The Role of Cheng Ho Mosque: The New Silk Road, Indonesia-China Relations in Islamic Cultural Identity." *Journal of Indonesian Islam* 8, no. 1 (2014): 23-38.

Masyrullahushomad, Masyrullahushomad. "Mengokohkan Persatuan Bangsa Pasca Konflik Bernuansa Agama di Ambon dan Poso." *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 15, no. 1 (2019).

Mubit, Rizal. "Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2016): 163-184.

Mubah, A. Safril. "Strategi meningkatkan daya tahan budaya lokal dalam menghadapi arus globalisasi." *Jurnal Unair* 24, no. 4 (2011): 302-308.

Musthofa, Budiman Mahmud. "PENGEMBANGAN BUDAYA MENUJU KESEJAHTERAAN BUDAYA: Pelajaran Dari Pengembangan Masyarakat Di Saung Angklung Udjo, Bandung, Jawa Barat." *Sosio Informa* 4, no. 3 (2018).

Mutawali, Mutawali. "Moderate Islam in Lombok: The dialectic between Islam and local culture." *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 2 (2016): 309-334.

Neuman, W. Lawrence. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi 7. Jakarta: PT Indeks, 2015.

Nurdin, M. Amin, Eva Nugraha dan Dadi Darmadi. *Sosiologi Al-Qur'an Agama dan Masyarakat dalam Islam*. Jakarta: LPPM UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Peursen, C.A. van. *Strategi Kebudayaan*, cetakan kelima. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Rahmatulloh, Rahmatulloh. "DINAMIKA KEPENDUDUKAN DI IBUKOTA JAKARTA (Deskripsi Perkembangan Kuantitas, Kualitas dan Kesejahteraan Penduduk di DKI Jakarta)." *Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 8, no. 2 (2018).

Sakina, Ade Irma. "Menyoroti budaya patriarki di Indonesia." *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 71-80.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Ed. Baru. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Suprapto, Suprapto. "Sasak Muslims And Interreligious Harmony: Ethnographic Study of the Perang Topat Festival in Lombok-Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017): 77-98.

Syaifuddin, Achmad Fedyani. "Membumikan multikulturalisme di Indonesia." *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI* 2, no. 1 (2006): 3-10.

Tantowi, Ali. "The Quest of Indonesian Muslim Identity: Debates on Veiling from the 1920s to 1940s." *Journal of Indonesian Islam* 4, no. 1 (2010): 62-90.

Triwardani, Reny, and Christina Rochayanti. "Implementasi Kebijakan Desa Budaya dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal." *Reformasi* 4, no. 2 (2014).

Tumanggor, Rusmin. "Masalah-masalah sosial budaya dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia." *Jurnal masyarakat dan Budaya* 12, no. 2 (2010): 231-254.

Yunus, Rasid. "Transformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai upaya pembangunan karakter bangsa." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 13, no. 1 (2013): 67-79.